



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 104 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 96).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan.
13. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
14. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal.
15. Program Pendidikan Non formal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

16. Kepala Sekolah adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Taman Kanak-kanak Negeri (TKN).
17. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
18. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
19. Koordinator adalah pejabat fungsional/pelaksana yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinir pejabat fungsional/pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu di wilayah kerja/unit kerja non struktural di wilayah kecamatan.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas terdiri :
  - a. Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
    1. SMP Negeri;
    2. SD Negeri; dan
    3. TK Negeri.
  - b. Satuan Pendidikan Nonformal adalah SKB.

- (2) SMPN, SDN dan TKN dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala SMPN, SDN dan TKN merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur tentang penunjukan Kepala Sekolah.
- (4) Bagan Organisasi SMPN, SDN dan TKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional Pamong Belajar atau Penilik Sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur tentang penunjukan Kepala SKB.
- (3) Bagan Organisasi SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Selain UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jatipuro;
  - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jatiyoso;
  - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jumapolo;
  - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jumantono;
  - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Matesih;
  - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Tawangmangu;
  - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Ngargoyoso;
  - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Karangpandan;
  - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Karanganyar;

- j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Tasikmadu;
- k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jaten;
- l. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Colomadu;
- m. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Gondangrejo;
- n. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kebakkramat;
- o. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Mojogedang;
- p. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kerjo;
- q. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jenawi.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pejabat fungsional pengawas sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator atau dari PNS lainnya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dibantu oleh Pelaksana.

- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

SMP Negeri

Pasal 7

- (1) SMPN merupakan UPT Dinas yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat dari seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pelayanan administrasi kesiswaan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah, pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah, pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta administrasi kepegawaian di sekolah.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menyusun program kegiatan bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di sekolah;
  - e. mengelola dan melayani administrasi kesiswaan;
  - f. mengelola dan melayani perpustakaan sekolah;
  - g. mengelola dan melayani administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah;
  - h. memberikan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### Paragraf 3

### SD Negeri

### Pasal 8

- (1) SDN merupakan UPT Dinas yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat dari seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pelayanan administrasi kesiswaaan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah, pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah, pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta administrasi kepegawaian di sekolah.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. menyusun program kegiatan bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di sekolah;
  - e. mengelola dan melayani administrasi kesiswaan;
  - f. mengelola dan melayani perpustakaan sekolah;

- g. mengelola dan melayani administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah;
- h. memberikan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Paragraf 4

#### TK Negeri

#### Pasal 9

- (1) TKN merupakan UPT Dinas yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat dari seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pelayanan administrasi kesiswaaan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah, pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah, pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta administrasi kepegawaian di sekolah.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. menyusun program kegiatan bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di sekolah;
- e. mengelola dan melayani administrasi kesiswaan;
- f. mengelola dan melayani perpustakaan sekolah;
- g. mengelola dan melayani administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah;
- h. memberikan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Paragraf 5

#### Satuan Pendidikan Nonformal SKB

#### Pasal 10

- (1) SKB merupakan UPT Dinas yang berbentuk satuan pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala SKB yang diangkat dari pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan SKB.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan SKB berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;

## Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha SKB dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKB.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan SKB berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian SKB;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha SKB;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 12

- (1) Susunan organisasi SMPN terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Susunan organisasi SDN terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan organisasi TKN terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Susunan organisasi SKB terdiri dari :
  - a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (5) Bagan Organisasi SMPN, SDN, TKN dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Selain Kepala UPT dan Kepala subbagian terdapat jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengawasan terhadap tugas bawahan.

#### Pasal 15

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas secara tepat dan sesuai ketentuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119), sepanjang yang mengatur tentang UPT pada Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 104

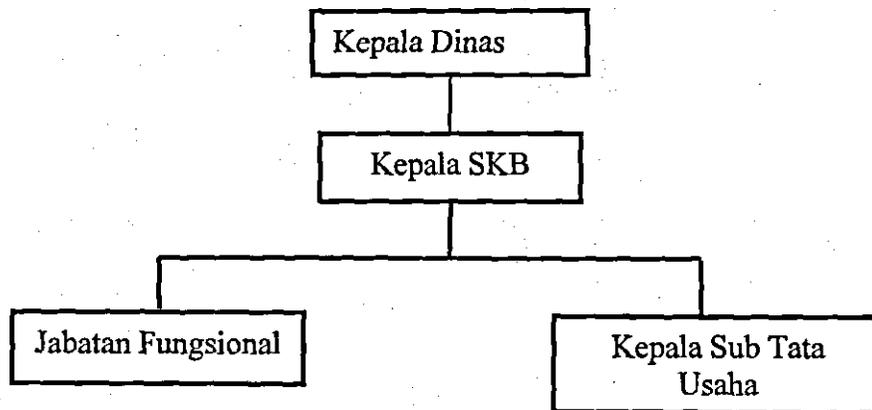
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, 

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

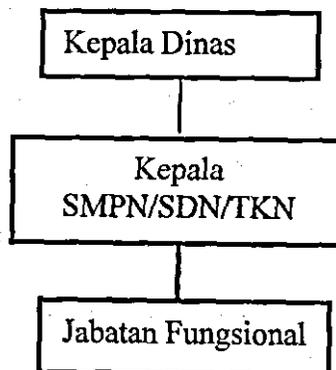
LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 104 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

A. SUSUNAN ORGANISASI SKB



B. SUSUNAN ORGANISASI SMPN DAN SDN



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR       TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN,       KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

DAFTAR UPT SMPN DAN SDN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. SMPN

1. SMP N 1 COLOMADU
2. SMP N 3 COLOMADU
3. SMP N 2 COLOMADU
4. SMP N 1 GONDANGREJO
5. SMP N 3 GONDANGREJO
6. SMP N 2 GONDANGREJO
7. SMP N 1 JATEN
8. SMP N 2 JATEN
9. SMP N 1 JATIPURO
10. SMP N 3 JATIPURO
11. SMP N 2 JATIPURO
12. SMP N 1 JATIYOSO
13. SMP N 3 JATIYOSO
14. SMP N 4 JATIYOSO
15. SMP N 2 JATIYOSO
16. SMP N 1 JENAWI
17. SMP N 2 JENAWI
18. SMP N 3 SATU ATAP JENAWI
19. SMP N 1 JUMANTONO
20. SMP N 3 JUMANTONO
21. SMP N 2 JUMANTONO
22. SMP N 1 JUMAPOLO
23. SMP N 3 JUMAPOLO
24. SMP N 2 JUMAPOLO

25. SMP N 5 KARANGANYAR
26. SMP N 4 KARANGANYAR
27. SMP N 3 KARANGANYAR
28. SMP N 2 KARANGANYAR
29. SMP N 1 KARANGANYAR
30. SMP N 3 KARANGPANDAN
31. SMP N 1 KARANGPANDAN
32. SMP N 2 KARANGPANDAN
33. SMP N 3 KEBAKKRAMAT
34. SMP N 2 KEBAKKRAMAT
35. SMP N 1 KEBAKKRAMAT
36. SMP N 2 KERJO
37. SMP N 1 KERJO
38. SMP N 3 SATU ATAP KERJO
39. SMP N 2 MATESIH
40. SMP N 1 MATESIH
41. SMP N 2 MOJOGEDANG
42. SMP N 3 MOJOGEDANG
43. SMP N 1 MOJOGEDANG
44. SMP N 2 NGARGOYOSO
45. SMP N 3 NGARGOYOSO
46. SMP N 1 NGARGOYOSO
47. SMP N 2 TASIKMADU
48. SMP N 3 TASIKMADU
49. SMP N 1 TASIKMADU
50. SMP N 2 TAWANGMANGU
51. SMP N 1 TAWANGMANGU

**B. SDN**

1. SDN 01 BLULUKAN COLOMADU
2. SDN 02 BLULUKAN COLOMADU
3. SDN 01 BOLON COLOMADU
4. SDN 02 BOLON COLOMADU
5. SDN 03 BOLON COLOMADU
6. SDN 01 GAWANAN COLOMADU
7. SDN 02 GAWANAN COLOMADU
8. SDN 01 GEDONGAN COLOMADU
9. SDN 02 GEDONGAN COLOMADU

10. SDN 01 KLODRAN COLOMADU
11. SDN 02 KLODRAN COLOMADU
12. SDN 01 MALANGJIWAN COLOMADU
13. SDN 02 MALANGJIWAN COLOMADU
14. SDN 03 MALANGJIWAN COLOMADU
15. SDN 05 MALANGJIWAN COLOMADU
16. SDN 06 MALANGJIWAN COLOMADU
17. SDN 01 NGASEM COLOMADU
18. SDN 02 NGASEM COLOMADU
19. SDN 01 TOHUDAN COLOMADU
20. SDN 03 TOHUDAN COLOMADU
21. SDN BATURAN COLOMADU
22. SDN GAJAHAN COLOMADU
23. SDN PAULAN COLOMADU
24. SDN 01 BULUREJO GONDANGREJO
25. SDN 02 BULUREJO GONDANGREJO
26. SDN 01 DAYU GONDANGREJO
27. SDN 02 DAYU GONDANGREJO
28. SDN 01 JATIKUWUNG GONDANGREJO
29. SDN 02 JATIKUWUNG GONDANGREJO
30. SDN 01 JERUKSAWIT GONDANGREJO
31. SDN 02 JERUKSAWIT GONDANGREJO
32. SDN 01 KARANGTURI GONDANGREJO
33. SDN 02 KARANGTURI GONDANGREJO
34. SDN 01 KRAGAN GONDANGREJO
35. SDN 02 KRAGAN GONDANGREJO
36. SDN 02 KRENDOWAHONO GONDANGREJO
37. SDN 01 PLESUNGAN GONDANGREJO
38. SDN 02 PLESUNGAN GONDANGREJO
39. SDN 03 PLESUNGAN GONDANGREJO
40. SDN 01 REJOSARI GONDANGREJO
41. SDN 02 REJOSARI GONDANGREJO
42. SDN 01 SELOKATON GONDANGREJO
43. SDN 02 SELOKATON GONDANGREJO
44. SDN 01 TUBAN GONDANGREJO
45. SDN 02 TUBAN GONDANGREJO
46. SDN 03 TUBAN GONDANGREJO
47. SDN 04 TUBAN GONDANGREJO

48. SDN 01 WONOREJO GONDANGREJO
49. SDN 02 WONOREJO GONDANGREJO
50. SDN 03 WONOREJO GONDANGREJO
51. SDN 04 WONOREJO GONDANGREJO
52. SDN 01 WONOSARI GONDANGREJO
53. SDN 02 WONOSARI GONDANGREJO
54. SDN 01 BRUJUL JATEN
55. SDN 02 BRUJUL JATEN
56. SDN 03 BRUJUL JATEN
57. SDN 01 DAGEN JATEN
58. SDN 02 DAGEN JATEN
59. SDN 01 JATEN
60. SDN 02 JATEN
61. SDN 03 JATEN
62. SDN 04 JATEN
63. SDN 01 JATI JATEN
64. SDN 02 JATI JATEN
65. SDN 03 JATI JATEN
66. SDN 01 JETIS JATEN
67. SDN 02 JETIS JATEN
68. SDN 03 JETIS JATEN
69. SDN 01 NGRINGO JATEN
70. SDN 02 NGRINGO JATEN
71. SDN 03 NGRINGO JATEN
72. SDN 04 NGRINGO JATEN
73. SDN 05 JATEN
74. SDN 05 NGRINGO JATEN
75. SDN 06 NGRINGO JATEN
76. SDN 07 NGRINGO JATEN
77. SDN 09 NGRINGO JATEN
78. SDN 11 NGRINGO JATEN
79. SDN 01 SROYO JATEN
80. SDN 02 SROYO JATEN
81. SDN 03 SROYO JATEN
82. SDN 01 SURUH KALANG JATEN
83. SDN 02 SURUH KALANG JATEN
84. SDN 03 SURUH KALANG JATEN
85. SDN 01 JATIHARJO JATIPURO

86. SDN 02 JATIHARJO JATIPURO
87. SDN 01 JATIKUWUNG JATIPURO
88. SDN 02 JATIKUWUNG JATIPURO
89. SDN 01 JATIMULYO JATIPURO
90. SDN 03 JATIMULYO JATIPURO
91. SDN 01 JATIPURO
92. SDN 02 JATIPURO
93. SDN 03 JATIPURO
94. SDN 01 JATIPURWO JATIPURO
95. SDN 02 JATIPURWO JATIPURO
96. SDN 03 JATIPURWO JATIPURO
97. SDN 01 JATIROYO JATIPURO
98. SDN 02 JATIROYO JATIPURO
99. SDN 03 JATIROYO JATIPURO
100. SDN 01 JATISOBO JATIPURO
101. SDN 02 JATISOBO JATIPURO
102. SDN 03 JATISOBO JATIPURO
103. SDN 04 JATISOBO JATIPURO
104. SDN 01 JATISUKO JATIPURO
105. SDN 02 JATISUKO JATIPURO
106. SDN 03 JATISUKO JATIPURO
107. SDN 01 JATIWARNO JATIPURO
108. SDN 02 JATIWARNO JATIPURO
109. SDN 03 JATIWARNO JATIPURO
110. SDN 01 NGEPUNGSARI JATIPURO
111. SDN 02 NGEPUNGSARI JATIPURO
112. SDN 03 NGEPUNGSARI JATIPURO
113. SDN 01 BERUK JATIYOSO
114. SDN 03 BERUK JATIYOSO
115. SDN 01 JATISAWIT JATIYOSO
116. SDN 02 JATISAWIT JATIYOSO
117. SDN 01 JATIYOSO
118. SDN 02 JATIYOSO
119. SDN 01 KARANGSARI JATIYOSO
120. SDN 02 KARANGSARI JATIYOSO
121. SDN 03 KARANGSARI JATIYOSO
122. SDN 04 KARANGSARI JATIYOSO
123. SDN 02 PETUNG JATIYOSO

124. SDN 03 PETUNG JATYOSO
125. SDN 01 TLOBO JATYOSO
126. SDN 02 TLOBO JATYOSO
127. SDN 03 TLOBO JATYOSO
128. SDN 01 WONOKELING JATYOSO
129. SDN 02 WONOKELING JATYOSO
130. SDN 03 WONOKELING JATYOSO
131. SDN 01 WONOREJO JATYOSO
132. SDN 02 WONOREJO JATYOSO
133. SDN 03 WONOREJO JATYOSO
134. SDN 04 WONOREJO JATYOSO
135. SDN 01 WUKIRSAWIT JATYOSO
136. SDN 02 WUKIRSAWIT JATYOSO
137. SDN 03 WUKIRSAWIT JATYOSO
138. SDN 04 WUKIRSAWIT JATYOSO
139. SDN 01 ANGGRASMANIS JENAWI
140. SDN 02 ANGGRASMANIS JENAWI
141. SDN 01 BALONG JENAWI
142. SDN 02 BALONG JENAWI
143. SDN 03 BALONG JENAWI
144. SDN 01 GUMENG JENAWI
145. SDN 03 GUMENG JENAWI
146. SDN 01 JENAWI
147. SDN 02 JENAWI
148. SDN 01 LEMPONG JENAWI
149. SDN 02 LEMPONG JENAWI
150. SDN 03 LEMPONG JENAWI
151. SDN 04 LEMPONG JENAWI
152. SDN 01 MENJING JENAWI
153. SDN 02 MENJING JENAWI
154. SDN 01 SELOROMO JENAWI
155. SDN 02 SELOROMO JENAWI
156. SDN 03 SELOROMO JENAWI
157. SDN 04 SELOROMO JENAWI
158. SDN 01 SIDOMUKTI JENAWI
159. SDN 02 SIDOMUKTI JENAWI
160. SDN 03 SIDOMUKTI JENAWI
161. SDN 01 TRENGGULI JENAWI

162. SDN 02 TRENGGULI JENAWI
163. SDN 01 BLORONG JUMANTONO
164. SDN 02 BLORONG JUMANTONO
165. SDN 03 BLORONG JUMANTONO
166. SDN 01 GEMANTAR JUMANTONO
167. SDN 02 GEMANTAR JUMANTONO
168. SDN 01 GENENGAN JUMANTONO
169. SDN 02 GENENGAN JUMANTONO
170. SDN 01 KEBAK JUMANTONO
171. SDN 02 KEBAK JUMANTONO
172. SDN 03 KEBAK JUMANTONO
173. SDN 04 KEBAK JUMANTONO
174. SDN 01 NGUNUT JUMANTONO
175. SDN 02 NGUNUT JUMANTONO
176. SDN 01 SAMBIREJO JUMANTONO
177. SDN 02 SAMBIREJO JUMANTONO
178. SDN 01 SEDAYU JUMANTONO
179. SDN 02 SEDAYU JUMANTONO
180. SDN 01 SRINGIN JUMANTONO
181. SDN 02 SRINGIN JUMANTONO
182. SDN 03 SRINGIN JUMANTONO
183. SDN 01 SUKOSARI JUMANTONO
184. SDN 02 SUKOSARI JUMANTONO
185. SDN 01 TUGU JUMANTONO
186. SDN 02 TUGU JUMANTONO
187. SDN 03 TUGU JUMANTONO
188. SDN 01 TUNGGULREJO JUMANTONO
189. SDN 02 TUNGGULREJO JUMANTONO
190. SDN 03 TUNGGULREJO JUMANTONO
191. SDN 04 TUNGGULREJO JUMANTONO
192. SDN 01 BAKALAN JUMAPOLO
193. SDN 02 BAKALAN JUMAPOLO
194. SDN 01 GIRIWONDO JUMAPOLO
195. SDN 02 GIRIWONDO JUMAPOLO
196. SDN 01 JATIREJO JUMAPOLO
197. SDN 02 JATIREJO JUMAPOLO
198. SDN 03 JATIREJO JUMAPOLO
199. SDN 01 JUMANTORO JUMAPOLO

200. SDN 02 JUMANTORO JUMAPOLO
201. SDN 03 JUMANTORO JUMAPOLO
202. SDN 01 JUMAPOLO
203. SDN 03 JUMAPOLO
204. SDN 01 KADIPIRO JUMAPOLO
205. SDN 02 KADIPIRO JUMAPOLO
206. SDN 01 KWANGSAN JUMAPOLO
207. SDN 02 KWANGSAN JUMAPOLO
208. SDN 03 KWANGSAN JUMAPOLO
209. SDN 01 LEMAHBANG JUMAPOLO
210. SDN 02 LEMAHBANG JUMAPOLO
211. SDN 01 PASEBAN JUMAPOLO
212. SDN 02 PASEBAN JUMAPOLO
213. SDN 01 PLOSO JUMAPOLO
214. SDN 02 PLOSO JUMAPOLO
215. SDN KARANGBANGUN JUMAPOLO
216. SDN KEDAWUNG JUMAPOLO
217. SDN 01 BEJEN KARANGANYAR
218. SDN 02 BEJEN KARANGANYAR
219. SDN 03 BEJEN KARANGANYAR
220. SDN 04 BEJEN KARANGANYAR
221. SDN 01 BOLONG KARANGANYAR
222. SDN 02 BOLONG KARANGANYAR
223. SDN 01 CANGAKAN KARANGANYAR
224. SDN 02 CANGAKAN KARANGANYAR
225. SDN 01 DELINGAN KARANGANYAR
226. SDN 02 DELINGAN KARANGANYAR
227. SDN 03 DELINGAN KARANGANYAR
228. SDN 01 GAYAMDOMPO KARANGANYAR
229. SDN 02 GAYAMDOMPO KARANGANYAR
230. SDN 01 GEDONG KARANGANYAR
231. SDN 02 GEDONG KARANGANYAR
232. SDN 03 GEDONG KARANGANYAR
233. SDN 01 JANTIHARJO KARANGANYAR
234. SDN 02 JANTIHARJO KARANGANYAR
235. SDN 01 JUNGKE KARANGANYAR
236. SDN 02 JUNGKE KARANGANYAR
237. SDN 01 KARANGANYAR

238. SDN 02 KARANGANYAR
239. SDN 03 KARANGANYAR
240. SDN 04 KARANGANYAR
241. SDN 01 LALUNG KARANGANYAR
242. SDN 02 LALUNG KARANGANYAR
243. SDN 03 LALUNG KARANGANYAR
244. SDN 01 POPONGAN KARANGANYAR
245. SDN 02 POPONGAN KARANGANYAR
246. SDN 03 POPONGAN KARANGANYAR
247. SDN 04 POPONGAN KARANGANYAR
248. SDN 01 TEGALGEDE KARANGANYAR
249. SDN 02 TEGALGEDE KARANGANYAR
250. SDN 04 TEGALGEDE KARANGANYAR
251. SDN 01 BANGSRI KARANGPANDAN
252. SDN 02 BANGSRI KARANGPANDAN
253. SDN 03 BANGSRI KARANGPANDAN
254. SDN 01 DAYU KARANGPANDAN
255. SDN 03 DAYU KARANGPANDAN
256. SDN 01 DOPLANG KARANGPANDAN
257. SDN 02 DOPLANG KARANGPANDAN
258. SDN 01 GERDU KARANGPANDAN
259. SDN 02 GERDU KARANGPANDAN
260. SDN 01 GONDANGMANIS KARANGPANDAN
261. SDN 02 GONDANGMANIS KARANGPANDAN
262. SDN 01 HARJOSARI KARANGPANDAN
263. SDN 02 HARJOSARI KARANGPANDAN
264. SDN 01 KARANG KARANGPANDAN
265. SDN 02 KARANG KARANGPANDAN
266. SDN 03 KARANG KARANGPANDAN
267. SDN 01 KARANGPANDAN
268. SDN 02 KARANGPANDAN
269. SDN 01 NGEMPLAK KARANGPANDAN
270. SDN 02 NGEMPLAK KARANGPANDAN
271. SDN 03 NGEMPLAK KARANGPANDAN
272. SDN 01 SALAM KARANGPANDAN
273. SDN 02 SALAM KARANGPANDAN
274. SDN 01 TOHKUNING KARANGPANDAN
275. SDN 02 TOHKUNING KARANGPANDAN

276. SDN 03 TOHKUNING KARANGPANDAN
277. SDN 01 ALASTUWO KEBAKKRAMAT
278. SDN 02 ALASTUWO KEBAKKRAMAT
279. SDN 03 ALASTUWO KEBAKKRAMAT
280. SDN 04 ALASTUWO KEBAKKRAMAT
281. SDN 01 BANJARHARJO KEBAKKRAMAT
282. SDN 02 BANJARHARJO KEBAKKRAMAT
283. SDN 03 BANJARHARJO KEBAKKRAMAT
284. SDN 01 KALIWULUH KEBAKKRAMAT
285. SDN 02 KALIWULUH KEBAKKRAMAT
286. SDN 03 KALIWULUH KEBAKKRAMAT
287. SDN 04 KALIWULUH KEBAKKRAMAT
288. SDN 01 KEBAK KEBAKKRAMAT
289. SDN 02 KEBAK KEBAKKRAMAT
290. SDN 03 KEBAK KEBAKKRAMAT
291. SDN 01 KEMIRI KEBAKKRAMAT
292. SDN 02 KEMIRI KEBAKKRAMAT
293. SDN 03 KEMIRI KEBAKKRAMAT
294. SDN 04 KEMIRI KEBAKKRAMAT
295. SDN 01 MACANAN KEBAKKRAMAT
296. SDN 02 MACANAN KEBAKKRAMAT
297. SDN 03 MACANAN KEBAKKRAMAT
298. SDN 01 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT
299. SDN 02 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT
300. SDN 03 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT
301. SDN 01 NANGSRI KEBAKKRAMAT
302. SDN 03 NANGSRI KEBAKKRAMAT
303. SDN 01 PULOSARI KEBAKKRAMAT
304. SDN 02 PULOSARI KEBAKKRAMAT
305. SDN 01 WARU KEBAKKRAMAT
306. SDN 02 WARU KEBAKKRAMAT
307. SDN 03 WARU KEBAKKRAMAT
308. SDN 01 BOTOK KERJO
309. SDN 02 BOTOK KERJO
310. SDN 01 GANTEN KERJO
311. SDN 02 GANTEN KERJO
312. SDN 01 GEMPOLAN KERJO
313. SDN 02 GEMPOLAN KERJO

314. SDN 01 KARANGREJO KERJO
315. SDN 02 KARANGREJO KERJO
316. SDN 03 KARANGREJO KERJO
317. SDN 04 KARANGREJO KERJO
318. SDN 05 KARANGREJO KERJO
319. SDN 01 KUTO KERJO
320. SDN 02 KUTO KERJO
321. SDN 03 KUTO KERJO
322. SDN 04 KUTO KERJO
323. SDN 05 KUTO KERJO
324. SDN 01 KWADUNGAN KERJO
325. SDN 02 KWADUNGAN KERJO
326. SDN 01 SUMBEREJO KERJO
327. SDN 02 SUMBEREJO KERJO
328. SDN 03 SUMBEREJO KERJO
329. SDN 01 TAMANSARI KERJO
330. SDN 02 TAMANSARI KERJO
331. SDN 01 TAWANGSARI KERJO
332. SDN 02 TAWANGSARI KERJO
333. SDN 03 TAWANGSARI KERJO
334. SDN PLOSOREJO KERJO
335. SDN 01 DAWUNG MATESIH
336. SDN 02 DAWUNG MATESIH
337. SDN 03 DAWUNG MATESIH
338. SDN 01 GANTIWARNO MATESIH
339. SDN 03 GANTIWARNO MATESIH
340. SDN 01 GIRILAYU MATESIH
341. SDN 03 GIRILAYU MATESIH
342. SDN 02 KARANG BANGUN MATESIH
343. SDN 03 KARANG BANGUN MATESIH
344. SDN 04 KARANGBANGUN MATESIH
345. SDN 01 KORIPAN MATESIH
346. SDN 02 KORIPAN MATESIH
347. SDN 03 KORIPAN MATESIH
348. SDN 01 MATESIH
349. SDN 02 MATESIH
350. SDN 03 MATESIH
351. SDN 04 MATESIH

352. SDN 05 MATESIH
353. SDN 01 NGADILUWIH MATESIH
354. SDN 02 NGADILUWIH MATESIH
355. SDN 03 NGADILUWIH MATESIH
356. SDN 01 PABLENGAN MATESIH
357. SDN 02 PABLENGAN MATESIH
358. SDN 03 PABLENGAN MATESIH
359. SDN 01 PLOSOREJO MATESIH
360. SDN 02 PLOSOREJO MATESIH
361. SDN 03 PLOSOREJO MATESIH
362. SDN 01 BUNTAR MOJOGEDANG
363. SDN 02 BUNTAR MOJOGEDANG
364. SDN 01 GEBYOG MOJOGEDANG
365. SDN 02 GEBYOG MOJOGEDANG
366. SDN 01 GENTUNGAN MOJOGEDANG
367. SDN 02 GENTUNGAN MOJOGEDANG
368. SDN 03 GENTUNGAN MOJOGEDANG
369. SDN 01 KALIBOTO MOJOGEDANG
370. SDN 02 KALIBOTO MOJOGEDANG
371. SDN 03 KALIBOTO MOJOGEDANG
372. SDN 01 KEDUNGJERUK MOJOGEDANG
373. SDN 02 KEDUNGJERUK MOJOGEDANG
374. SDN 01 MOJOGEDANG
375. SDN 03 MOJOGEDANG
376. SDN 04 MOJOGEDANG
377. SDN 01 MOJOROTO MOJOGEDANG
378. SDN 02 MOJOROTO MOJOGEDANG
379. SDN 01 MUNGUR MOJOGEDANG
380. SDN 02 MUNGUR MOJOGEDANG
381. SDN 03 MUNGUR MOJOGEDANG
382. SDN 01 NGADIREJO MOJOGEDANG
383. SDN 02 NGADIREJO MOJOGEDANG
384. SDN 03 NGADIREJO MOJOGEDANG
385. SDN 01 PENDEM MOJOGEDANG
386. SDN 02 PENDEM MOJOGEDANG
387. SDN 03 PENDEM MOJOGEDANG
388. SDN 01 PERENG MOJOGEDANG
389. SDN 02 PERENG MOJOGEDANG

390. SDN 03 PERENG MOJOGEDANG
391. SDN 01 POJOK MOJOGEDANG
392. SDN 02 POJOK MOJOGEDANG
393. SDN 03 POJOK MOJOGEDANG
394. SDN 01 SEWUREJO MOJOGEDANG
395. SDN 02 SEWUREJO MOJOGEDANG
396. SDN 03 SEWUREJO MOJOGEDANG
397. SDN 04 SEWUREJO MOJOGEDANG
398. SDN 01 BERJO NGARGOYOSO
399. SDN 03 BERJO NGARGOYOSO
400. SDN 01 DUKUH NGARGOYOSO
401. SDN 02 DUKUH NGARGOYOSO
402. SDN 01 GIRIMULYO NGARGOYOSO
403. SDN 03 GIRIMULYO NGARGOYOSO
404. SDN 01 KEMUNING NGARGOYOSO
405. SDN 02 KEMUNING NGARGOYOSO
406. SDN 03 KEMUNING NGARGOYOSO
407. SDN 04 KEMUNING NGARGOYOSO
408. SDN 05 KEMUNNG NGARGOYOSO
409. SDN 01 NGARGOYOSO
410. SDN 02 NGARGOYOSO
411. SDN 03 NGARGOYOSO
412. SDN 01 NGLEGOK NGARGOYOSO
413. SDN 02 NGLEGOK NGARGOYOSO
414. SDN 01 PUNTUKREJO NGARGOYOSO
415. SDN 02 PUNTUKREJO NGARGOYOSO
416. SDN 01 SEGORO GUNUNG NGARGOYOSO
417. SDN 02 SEGORO GUNUNG NGARGOYOSO
418. SDN JATIREJO NGARGOYOSO
419. SDN 01 BURAN TASIKMADU
420. SDN 03 BURAN TASIKMADU
421. SDN 01 GAUM TASIKMADU
422. SDN 02 GAUM TASIKMADU
423. SDN 01 KALIJIRAK TASIKMADU
424. SDN 02 KALIJIRAK TASIKMADU
425. SDN 03 KALIJIRAK TASIKMADU
426. SDN 01 KALING TASIKMADU
427. SDN 02 KALING TASIKMADU

428. SDN 03 KALING TASIKMADU
429. SDN 01 KARANGMOJO TASIKMADU
430. SDN 02 KARANGMOJO TASIKMADU
431. SDN 03 KARANGMOJO TASIKMADU
432. SDN 01 NGIJO TASIKMADU
433. SDN 02 NGIJO TASIKMADU
434. SDN 01 PANDEYAN TASIKMADU
435. SDN 02 PANDEYAN TASIKMADU
436. SDN 03 PANDEYAN TASIKMADU
437. SDN 01 PAPAHAH TASIKMADU
438. SDN 02 PAPAHAH TASIKMADU
439. SDN 03 PAPAHAH TASIKMADU
440. SDN 01 SURUH TASIKMADU
441. SDN 03 SURUH TASIKMADU
442. SDN 01 WONOLOPO TASIKMADU
443. SDN 02 WONOLOPO TASIKMADU
444. SDN 03 WONOLOPO TASIKMADU
445. SDN 01 BANDARDAWUNG TAWANGMANGU
446. SDN 03 BANDARDAWUNG TAWANGMANGU
447. SDN 01 BLUMBANG TAWANGMANGU
448. SDN 02 BLUMBANG TAWANGMANGU
449. SDN 03 BLUMBANG TAWANGMANGU
450. SDN 01 GONDOSULI TAWANGMANGU
451. SDN 02 GONDOSULI TAWANGMANGU
452. SDN 03 GONDOSULI TAWANGMANGU
453. SDN 01 KALISORO TAWANGMANGU
454. SDN 02 KALISORO TAWANGMANGU
455. SDN 03 KALISORO TAWANGMANGU
456. SDN 01 KARANGLO TAWANGMANGU
457. SDN 03 KARANGLO TAWANGMANGU
458. SDN 01 NGLEBAK TAWANGMANGU
459. SDN 02 NGLEBAK TAWANGMANGU
460. SDN 03 NGLEBAK TAWANGMANGU
461. SDN 01 PLUMBON TAWANGMANGU
462. SDN 02 PLUMBON TAWANGMANGU
463. SDN 03 PLUMBON TAWANGMANGU
464. SDN 04 PLUMBON TAWANGMANGU
465. SDN 01 SEPANJANG TAWANGMANGU

- 466. SDN 03 SEPANJANG TAWANGMANGU
- 467. SDN 01 TAWANGMANGU
- 468. SDN 03 TAWANGMANGU
- 469. SDN 04 TAWANGMANGU
- 470. SDN 05 TAWANGMANGU
- 471. SDN 06 TAWANGMANGU
- 472. SDN 01 TENGGLIK TAWANGMANGU
- 473. SDN 02 TENGGLIK TAWANGMANGU

C. TKN

- 1. TKN Pembina Karanganyar
- 2. TKN Pembina Tasikmadu
- 3. TKN Pembina Jaten

D. SKB

SKB Karanganyar

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO